

# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021**

## **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR**

**Peraturan Walikota Blitar No. 23 Tahun 2018  
Tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Blitar No. 81 Tahun 2016  
Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021  
Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sebagai sebuah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Blitar. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Blitar, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

Pada Tahun 2018 terjadi perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyatakan perlu adanya penyesuaian berupa perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.
2. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
4. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2016-2021, didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178 );
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2015 - 2019
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar; dan
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah untuk menyediakan arah kebijakan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selama 5 tahun, yang disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021.

## **b. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas PUPR selama 5 (lima) terakhir pada periode pembangunan yang lalu.
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas PUPR selama 5 (lima) tahun mendatang.
- c. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021 kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.
- d. Menetapkan rencana program dan kegiatan Dinas PUPR yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang.
- e. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas PUPR selama 5 (lima) tahun mendatang.
- f. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD; dan
- g. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

### **Bab I PENDAHULUAN**

Berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan sistematika penulisan Renstra.

### **Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi informasi tentang peran (tugas, fungsi, Struktur Organisasi ) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas tantangan dan peluang penembangan

pelayanan perangkat daerah yang dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD. Dari identifikasi permasalahan dan telaahan tersebut bisa ditentukan Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

### Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar untuk kurun waktu pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan.

### Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar untuk kurun waktu pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan

### Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar pada Tahun 2016 – 2021.

### Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### Bab VIII PENUTUP

Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2016 – 2021,

khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pertanahan.

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah sebagai berikut :

##### **1. Tugas**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

##### **2. Fungsi**

1. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan
4. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan
5. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja.
6. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
8. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
9. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)



10. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat.
12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah
13. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Sekretariat**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang - bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing - masing bidang secara terpadu ;
3. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas ;
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat ;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ;
6. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ;
7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

8. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) ;
9. Pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
10. Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas.
11. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas ;
12. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan
13. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana - prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas ;
14. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
15. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
16. Fasilitasi penyusunan dan .pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah ;
17. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya ;
18. Fasilitasi verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan ;
19. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan
20. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP) ;
22. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
23. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;
24. Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ;

25. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
26. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
27. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan
28. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi
29. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas ;
30. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **b. Bidang Tata Ruang**

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Tata Ruang.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang Tata Ruang
3. Penyusunan perencanaan operasional program Tata Ruang sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
4. Pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan rencana tata ruang wilayah kota;
5. Pengendalian dan monitoring pemanfaatan rencana tata ruang wilayah kota;
6. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan tata bangunan serta pengendalian pemanfaatan ruang ;
7. Pemutakhiran data di bidang Tata Ruang ;

8. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria tata ruang :
9. Pelaksanaan kegiatan survey dan pemetaan tata ruang :
10. Penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang ( rencana detail dan rencana teknis ) secara terpadu dengan SKPD terkait;
11. Fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi bidang tata kota; pelaksanaan sosialisasi dan implernentasi bidang tata kota ;
12. Pengawasan terhadap pemenuhan standart nasional bidang Tata Ruang ;
13. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan pembinaan dalam peningkatan pelayanan penyelesaian sertifikasi hak-hak tanah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan ;
14. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi bidang tata ruang sesuai kewenangannya
15. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Tata Ruang ;
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**c. Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi**

Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi ;
2. Perencanaan operasional program bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
3. Fasilitasi pembangunan, renovasi dan rehâbilitasi bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
5. Pelaksanaan analisa data sebagai bahan penetapan dan daya guna bangunan gedung dan rumah negara;
6. Pengusulan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;

7. Pelaksanaan monitoring dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;
8. Fasilitasi upaya penyelamatan bangunan gedung dan rumah Negara
9. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan prasarana permukiman di bidang air limbah, drainase dan air minum;
10. Pelaksanaan monitoring pembangunan gedung milik pemerintah;
11. Pelaksanaan pengolahan dan pengelolaan dokumentasi dan data bangunan gedung pemerintah;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dan informasi dalam perencanaan pendirian bangunan gedung serta bangunan pendukung lainnya;
13. Pelaksanaan monitoring dan pembinaan jasa konstruksi;
14. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kota;
15. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan penyelenggaraan pelayanan bina konstruksi;
16. Pelaksanaan pembinaan dan monitoring teknis bangunan - gedung, jalan, jembatan, drainase, air bersih dan bangunan konstruksi lainnya kepada SKPD/instansi dan masyarakat;
17. Pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
18. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**d. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air**

Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

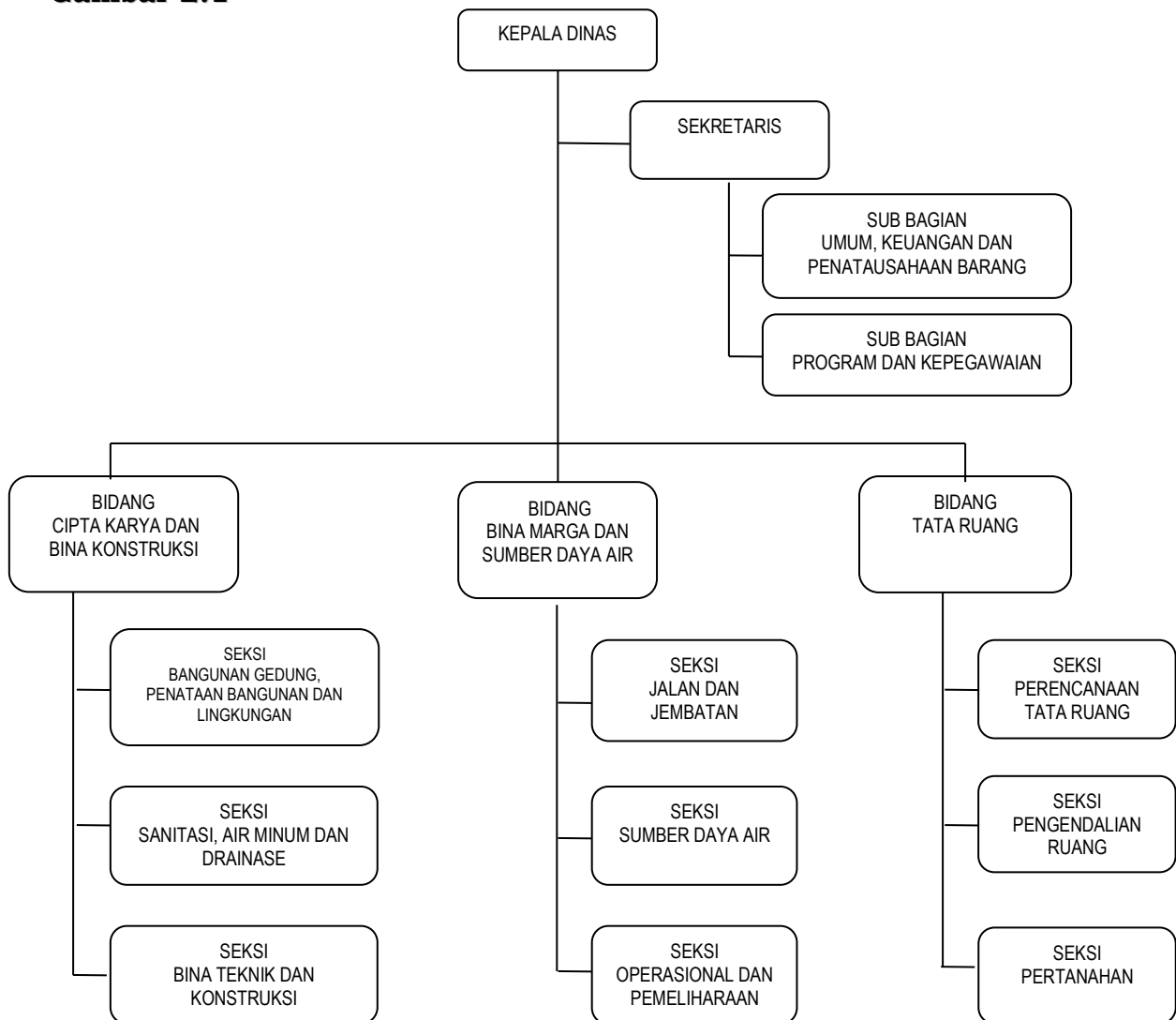
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;

2. Penyusunan program / kegiatan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
3. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
4. Pembuatan kebijakan standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
5. Perencanaan operasional program bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
6. Pelaksanaan kegiatan pemantauan, studi kelayakan dan AMDAL dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan pemanfaatan jalan, jaringan pengairan serta pemanfaatan pengairan;
7. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pembangunan jalan, peningkatan jalan serta pembangunan dan peningkatan jembatan;
8. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan dan irigasi serta pemanfaatan peralatan;
9. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan drainase, tembok penahan, resapan air hujan dan penyediaan jalan lingkungan;
10. Pelaksanaan sosialisasi di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
11. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
12. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air ;
13. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
14. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## 1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat di jabarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**



**a. Kepala Dinas,**

**b. Sekretariat Dinas, membawahi :**

- Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang
- Sub Bagian Program dan Kepegawaian.

**c. Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi, membawahi :**

- Seksi Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Seksi Sanitasi, Air Minum dan Drainase
- Seksi Bina Teknik dan Konstruksi

**d. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, membawahi :**

- Seksi Jalan dan Jembatan
- Seksi Sumber Daya Air
- Seksi Operasional dan Pemeliharaan

**e. Bidang Tata Ruang, membawahi :**

- Seksi Perencanaan Tata Ruang
- Seksi Pengendalian Ruang
- Seksi Pertanahan

## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, salah satu aspek yang sangat mendukung adalah tersedianya SDM baik ditinjau dari segi kecukupan akan kuantitas juga ditinjau dari segi kualitas SDM. Berikut dijelaskan kondisi SDM yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah sebagai berikut :

### a. Susunan Kepegawaian

Dukungan personil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat diperinci sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki - Laki	27 orang	
2	Perempuan	7 orang	
<b>Jumlah</b>		<b>34 orang</b>	

Data : bulan Juli 2018

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana S-2	Magister Teknik ( MT )	5 orang	
		Magister Sains ( M.Si )	2 orang	
2	Sarjana S-1	- Teknik Sipil	5 orang	
		- Teknik Arsitektur	3 orang	
		- Teknik Geodesi	1 orang	
		- Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	1 orang	
		- Desain Interior	1 orang	
		- Administrasi Negara	1 orang	
		- Ekonomi	2 orang	
		- Budidaya Perairan	1 orang	



No	Tingkat Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
3	Diploma D-3	- Teknik Bangunan	2 orang	
		- Pendidikan	1 orang	
4	STM	- Mesin	1 orang	
		- Listrik	1 orang	
		- Bangunan	2 orang	
5	SMA / Sederajat		4 orang	
6	SLTP		1 orang	
7	SD		1 orang	

Data : bulan Juli 2018

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai menurut Pangkat / Golongan Ruang**

No	Golongan		Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama Muda	IV / c	1 orang	
2	Pembina Tingkat I	IV / b	1 orang	
3	Pembina	IV / a	2 orang	
<b>Jumlah Golongan IV</b>			<b>4 orang</b>	
2	Penata Tk. I	III/d	12 orang	
	Penata	III/c	4 orang	
	Penata Muda Tk. I	III/b	1 orang	
	Penata Muda	III/a	2 orang	
<b>Jumlah Golongan III</b>			<b>19 orang</b>	
3	Pengatur	II/c	8 orang	
	Pengatur Muda Tk. I	II/b	- orang	
	Pengatur Muda	II/a	2 orang	
<b>Jumlah Golongan II</b>			<b>10 orang</b>	
4	Juru Tk. I	I/d	0 orang	
	Juru	I/c	1 orang	
<b>Jumlah Golongan I</b>			<b>1 orang</b>	
<b>Jumlah Keseluruhan</b>			<b>34 orang</b>	

Data : bulan Juli 2018

**Tabel 2.4**  
**Pegawai yang mengikuti Diklat Struktural**

No	Diklat Struktural	Jumlah	Keterangan
1	Diklatpim Tk. II	1 orang	
2	Diklatpim Tk. III	4 orang	
3	Diklatpim Tk. IV	8 orang	

Data : bulan Juli 2018

**Tabel 2.5**  
**Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional**

No	Diklat Teknis Fungsional	Jumlah	Keterangan
1	Diklat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	13 Orang	
2	Diklat Pengelola Teknis Pembangunan Gedung Negara	4 Orang	
3	Diklat Hukum Kontrak Konstruksi	4 Orang	
4	Diklat Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung dan Lingkungan Tingkat Dasar	2 Orang	
5	Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan	1 Orang	
6	Diklat Penyelenggaraan Perumahan	1 Orang	
7	Diklat Pengelolaan Rumah Susun Sewa	2 Orang	
8	Diklat Manajemen Prasarana dan Sarana Perkotaan	1 Orang	
9	Diklat Pengawasan Bangunan Gedung Negara	1 Orang	
10	Diklat Pengelolaan Data Jalan	1 Orang	
11	Diklat Pemeliharaan Jalan	2 Orang	
12	Pelatihan Manajemen Operasi dan Pemeliharaan / Perbaikan Alat Berat	1 Orang	
13	Diklat Pengawasan Jalan dan Jembatan	4 Orang	
14	Kursus Bangunan Tahan Gempa	2 Orang	
15	Kursus Sanitasi / PLP	3 Orang	
<b>Jumlah</b>		<b>42 Orang</b>	

Data : bulan Juli 2018

**b. Sarana dan Prasarana**

Selain Aspek SDM, Sarana Prasarana sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar. Adapun Sarana Prasarana yang ada dapat dikelompokkan sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Barang Tidak Bergerak**

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>I</b>	<b>Bidang Tanah</b>	2760 m <sup>2</sup>	
<b>II</b>	<b>Bangunan Gedung</b>	988 m <sup>2</sup>	

**Tabel 2.7**  
**Alat – Alat Berat / Bermesin**

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH ( Unit )</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Mesin Gilas 8 Ton	5	4 unit baik, 1 unit rusak
2	Mesin Gilas 2 Ton	3	1 unit sedang, 2 unit rusak
3	Mesin Gilas 1 Ton	2	Rusak berat
4	Stemper	1	Rusak
5	Mixer Beton	1	Rusak
6	Mobil Kijang Innova	1	Baik
7	Mobil Kijang Pick Up	1	Baik
8	Mobil Daihatsu Pick Up	1	Sedang
9	Mitsubishi Dump Truck	1	Baik
10	Isuzu Panther Pick Up	1	Baik
11	Sepeda Motor Roda 2	16	15 Baik, 1 Sedang
12	Sepeda Motor Roda 3	2	Baik
13	Core Drill BI - 400 A	1	Baik
14	Alphomain Road Maintenance Truck	1	Baik

**Tabel 2.8**  
**Alat – Alat Bengkel Tak Bermesin**

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH ( Unit )</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Theodolite GTS 220 Series	1	Baik
2	Hammer Test CO-500	1	Baik
3	Sondir SO-200 ( Kap 2,5 T )	1	Baik

**Tabel 2.9**  
**Peralatan Kantor / Meubelair**

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Meja Tulis 1 biro	6 bh	Baik
2	Meja Tulis ½ biro	43 buah	Baik
3	Meja Tamu	6 set	Baik
4	Meja Computer	12 buah	Baik
5	Kursi Putar	24 buah	Baik
6	Kursi Duduk	45 buah	Baik
7	Kursi Plastik / Napoli	56 buah	Baik
8	Kursi Rapat	100 buah	Baik
9	Almari	9 buah	Baik
10	Gambar Garuda, Presiden dan Wakil Presiden	3 buah	Baik
11	Jam tembok	7 buah	Baik
12	Filling kabinet	23 buah	Baik
13	Filling kayu	3 buah	Baik
14	Pot Bunga	17 buah	Baik
15	Rak besar	2 buah	Baik
16	Rak kecil	1 buah	Baik
17	Tempat minuman galon	5 buah	Baik
18	Rak tempat gambar	9 buah	Baik
19	Meja gambar	3 buah	Baik
21	Computer	13 buah	Baik
22	Laptop	5 buah	Baik
23	Mesin ketik	6 buah	Rusak
24	Kipas angin berdiri	8 buah	Baik
25	Papan Struktur Organisasi	1 buah	Baik

### 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung Visi dan Misi pada Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dimana Tahun 2015, Kondisi Fisik Prasarana dan Sarana Transportasi serta Permukiman Memadai untuk Mendukung Aktivitas Perkotaan Menuju Terwujudnya Kota Blitar sebagai Kota Jasa, Perdagangan dan Pariwisata melalui pembangunan sarana prasarana kota serta pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Bahwa sebagian besar jalan sudah diaspal dalam kondisi baik. Adapun kriteria / kelas jalan yang ada di Kota Blitar terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kota, dengan kondisi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
**Kriteria dan Kondisi Jalan**

No.	Keadaan Jalan	Status Jalan ( Km )					
		Jalan Nasional		Jalan Propinsi		Jalan Kota	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
I.	Jenis Permukaan						
	1. Aspal	8	8	5,51	5,51	263,54	263,586
	2. Tanah					0,426	0,381
	3. Lainnya						0
	Jumlah I	8.000	8.000	5.510	5.510	263,966	263,967
No.	Keadaan Jalan	Status Jalan ( Km )					
		Jalan Nasional		Jalan Propinsi		Jalan Kota	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
II.	Kondisi Jalan						
	1. Baik	6.350	6.350	3.051	3.051	261,206	256,154
	2. Sedang	1.650	1.650	2.459	2.459	2,334	7,432
	3. Rusak					0,426	0,268
	4. Rusak Berat						0,113
	Jumlah II	8.000	8.000	5.510	5.510	263,966	263,967

Data : Dinas PU & Penataan Ruang Kota Blitar bulan Juli 2018

Selain sarana prasarana penunjang perkotaan dalam kondisi baik, masih ada bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tata guna lahan yaitu bangunan-bangunan yang melanggar sempadan jalan dan sungai.

Tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah dijabarkan pada Matrik Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD ( Tabel 2.11 ) dan Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD ( Tabel 2.12 ) pada Renstra ini.



**Tabel 2.11.1**  
**Matrik Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2011-2015**

Kinerja sesuai dengan tugas & fungsi SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Terwujudnya kualitas jalan dan jembatan, drainase, irigasi sesuai standar	1. Prosentase jalan dalam kondisi baik	%	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	70,00	70,00	70,00	80,00	98,95	87,50	87,50	87,50	100,00	98,95
	2. Prosentase jembatan dalam kondisi baik	%	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	70,00	70,00	70,00	80,00	97,28	87,50	87,50	87,50	100,00	97,28
	2. Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	70,00	75,00	70,00	70,00	91,23	87,50	93,75	87,50	87,50	91,23
Terwujudnya kualitas lingkungan permukiman serta bangunan gedung sesuai standar dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatnya jaringan air bersih bagi masyarakat	%	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	25,39	87,50	87,50	87,50	87,50	25,39
	2. Berkurangnya kawasan dengan kondisi sanitasi yang buruk	%	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	70,00	75,00	75,00	75,00	97,89	87,50	93,75	93,75	93,75	97,89
	3. Terciptanya bangunan gedung pemerintah yang representatif	unit		1,00	3,00	3,00	6,00		1,00	3,00	3,00	4,00		100,00	100,00	100,00	66,67
Tersedianya dokumen penataan ruang kota dengan didukung oleh peraturan perundangan serta peningkatan kualitas SDM dalam usaha penanganan penataan ruang	1. Tersedianya dokumen perencanaan penataan ruang	dok		1,00	2,00	2,00	1,00		1,00	2,00	2,00	1,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	2. Peningkatan kualitas SDM dalam usaha penanganan penataan ruang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	70,00	80,00	80,00	66,67	50,00	70,00	80,00	80,00	66,67
Meningkatkan penyediaan data base yang lengkap dan akurat	Tersedianya data base yang lengkap dan akurat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	20,00	80,00	80,00	80,00	80,00	20,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00
Terwujudnya kualitas bangunan pemerintah yang memenuhi SNI	Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan bangunan infrastruktur yang sesuai SNI	dok		1,00	1,00	18,00	58,00		1,00	1,00	15,00	58,00		100,00	100,00	83,33	100,00
	Meningkatnya Keahlian Tenaga Perencana Teknis dengan memiliki SKA / SKT	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00	80,00	0,00	0,00	0,00	30,00	80,00

**Tabel 2.11.2**  
**Matrik Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2016-2017**

No.	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		REALISASI		Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	90,07	91,59	90,07	93,09	100,00	101,64
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	73,5	74	73,55	74,069	100,07	100,09
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	95,1	92	91,62	94,4	96,34	102,61
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakaryaan	Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar  ( Standar : Permen PU Nomer 45/PRT/M/2007 )	-	55	-	93,17	-	169,40
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	81,08	87,39	80,94	86,35	99,83	98,81
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah	98	98,1	98,22	99,02	100,22	100,94



**Tabel 2.12.1**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2011-2015**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>139.500.000,00</b>	<b>120.368.050,00</b>	<b>133.400.000,00</b>	<b>287.103.500,00</b>	<b>476.094.100,00</b>	<b>175.704.357,00</b>	<b>278.814.501,00</b>	<b>601.974.550,00</b>	<b>382.579.700,00</b>	<b>694.610.500,00</b>	125,95%	231,63%	451,26%	133,25%	145,90%	<b>44,54%</b>	<b>54,93%</b>
Pendapatan Asli Daerah	139.500.000,00	120.368.050,00	133.400.000,00	287.103.500,00	476.094.100,00	175.704.357,00	278.814.501,00	601.974.550,00	382.579.700,00	694.610.500,00	125,95%	231,63%	451,26%	133,25%	145,90%	44,54%	54,93%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>59.430.145.850,00</b>	<b>31.092.204.604,49</b>	<b>45.119.079.689,60</b>	<b>48.666.101.894,48</b>	<b>77.235.874.178,80</b>	<b>55.499.650.280,00</b>	<b>27.832.239.164,00</b>	<b>37.726.508.096,00</b>	<b>42.991.043.063,00</b>	<b>72.157.877.770,00</b>	93,39%	89,52%	83,62%	88,34%	93,43%	<b>15,99%</b>	<b>16,87%</b>
Belanja Tidak Langsung	2.343.101.850,00	2.347.187.811,00	2.320.197.002,50	2.548.424.177,48	2.410.506.475,00	2.071.618.295,00	2.208.192.873,00	2.263.575.744,00	2.170.528.999,00	2.351.912.922,00	88,41%	94,08%	97,56%	85,17%	97,57%	0,86%	3,34%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Langsung	57.087.044.000,00	28.745.016.793,49	42.798.882.687,10	46.117.677.717,00	74.825.367.703,80	53.428.031.985,00	25.624.046.291,00	35.462.932.352,00	40.820.514.064,00	69.805.964.848,00	93,59%	89,14%	82,86%	88,51%	93,29%	17,31%	18,12%
<b>TOTAL</b>	<b>59.569.645.850,00</b>	<b>31.212.572.654,49</b>	<b>45.252.479.689,60</b>	<b>48.953.205.394,48</b>	<b>77.711.968.278,80</b>	<b>55.675.354.637,00</b>	<b>28.111.053.665,00</b>	<b>38.328.482.646,00</b>	<b>43.373.622.763,00</b>	<b>72.852.488.270,00</b>	<b>93,46%</b>	<b>90,06%</b>	<b>84,70%</b>	<b>88,60%</b>	<b>93,75%</b>	<b>16,08%</b>	<b>16,99%</b>

**Tabel 2.12.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2017**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN		RATA-RATA PERTUMBUHAN		KETERANGAN
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI	
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>822.004.400,00</b>	<b>252.069.762,00</b>	<b>1.172.747.600,00</b>	<b>333.604.550,00</b>	<b>142,67%</b>	<b>132,35%</b>	<b>-69,33%</b>	<b>-71,55%</b>	Terjadi penurunan alokasi anggaran karena adanya SOTK baru
Pendapatan Asli Daerah	822.004.400,00	252.069.762,00	1.172.747.600,00	333.604.550,00	142,67%	132,35%	-69,33%	-71,55%	
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>127.479.907.150,80</b>	<b>88.561.958.388,10</b>	<b>124.273.700.503,63</b>	<b>84.717.969.177,50</b>	<b>97,48%</b>	<b>95,66%</b>	<b>-30,53%</b>	<b>-31,83%</b>	
Belanja Tidak Langsung	2.964.842.325,00	3.227.123.988,10	2.918.254.218,63	2.242.311.585,00	98,43%	69,48%	8,85%	-23,16%	
Belanja Langsung	124.515.064.825,80	85.334.834.400,00	121.355.446.285,00	82.475.657.592,50	97,46%	96,65%	-31,47%	-32,04%	
<b>TOTAL</b>	<b>128.301.911.550,80</b>	<b>88.814.028.150,10</b>	<b>125.446.448.103,63</b>	<b>85.051.573.727,50</b>	<b>97,77%</b>	<b>95,76%</b>	<b>-30,78%</b>	<b>-32,20%</b>	

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan / wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya).

Tahun 2017, bahwa kondisi fisik prasarana dan sarana transportasi serta permukiman kota Blitar memadai untuk mendukung aktifitas perkotaan menuju terwujudnya Blitar sebagai kota yang mengedepankan pemanfaatan APBD Pro-Rakyat.

Hal ini telah menunjukkan bahwa kondisi Kota Blitar yang diharapkan dapat diwujudkan apabila pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana program dan kegiatan selama lima tahun kedepan, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dimana hal ini merupakan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar khususnya pembangunan infrastruktur.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menangani dua urusan wajib ( Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ; Urusan Pertanahan ) adalah :

1. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi.
2. Perubahan iklim yang tidak menentu, mempengaruhi jadwal kegiatan dilapangan
3. Kecenderungan pelanggaran terhadap tata ruang.
4. Potensi Sumber Daya Alam terbatas

Sedangkan Peluang untuk mengembangkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan dua urusan wajib ( Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ; Urusan Pertanahan ) adalah :

1. Adanya potensi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana di wilayah Kota Blitar.
2. Banyaknya Pengusaha Jasa Konstruksi di Kota Blitar.
3. Tersedianya tenaga kerja di pasar kerja yang cukup memadai.
4. Pelaksanaan prinsip APBD Pro Rakyat secara efektif

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Degradasi kualitas layanan jalan
2. Pemanfaatan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya
3. Rasio kecukupan penyediaan air minum layak bagi masyarakat.
4. Rasio kecukupan penyediaan sarana air limbah bagi masyarakat
5. Adanya penyimpangan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Tata Ruang

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Tonase kendaraan yang melewati jalan tidak sesuai dengan kapasitas jalan
2. Terdapatnya saluran drainase yang juga berfungsi sebagai jaringan pengairan
3. Terbatasnya sumber mata air, sehingga membutuhkan anggaran yang besar untuk pemenuhan pelayanan air bersih
4. Pelayanan akses air bersih yang melalui PDAM kurang optimal
5. Adanya pemanfaatan IPAL komunal yang kurang optimal
6. Ketaatan masyarakat terhadap peraturan tata ruang, perizinan serta persyaratan tata bangunan dan lingkungan masih rendah

#### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

##### **a. Visi Kota Blitar 2016-2021 :**

*“ Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021 “*

##### **b. Misi Kota Blitar 2016-2021 :**

1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religious dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi.
3. **Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.**
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.
5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

**c. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi ketiga yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar :**

**Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar**

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
<b>Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan</b>	<b>Persentase infrastruktur bidang pekerjaan umum dalam kondisi baik</b>	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakaryaan	1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih
			2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah
			3. Persentase saluran drainase dalam kondisi baik
4. Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart			
Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang		

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI**

#### **3.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

**VISI :**

*“ Tersedianya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Hhandal untuk mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong “*

**MISI :**

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip „infrastruktur untuk semua“ Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance

**Tabel 3.2**

**Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2014-2019**

<b>No.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGI</b>
1	Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGI
	antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
2	Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi	Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energy Meningkatnya ketahanan air
3	Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
4	Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
5	Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

### 3.3.2 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

#### 1. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

##### VISI :

*“ Tersedianya infrastruktur jalan provinsi yang aman, nyaman dan lancar dalam mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur”*

##### MISI :

- Meningkatkan kondisi pelayanan jalan provinsi di Jawa Timur



- Meningkatkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Potensial

**Tabel 3.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
1. Meningkatnya jalan provinsi yang dapat dilalui dengan cepat, aman dan nyaman	1. Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan provinsi	1. Menempatkan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur sesuai dengan kompetensi yang diperlukan	1. Mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala prasarana jalan dan jembatan
2. Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial	1. Meningkatnya Penyelesaian Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial	2. Memanfaatkan teknologi jalan dan jembatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan	2. Penanganan cepat terhadap perbaikan prasarana jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam
		3. Meningkatkan sarana dan prasarana peralatan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan tanggap darurat	3. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas
		4. Meningkatkan mutu penyelenggaraan jalan dan jembatan dengan dukungan unit pengendali mutu dan pengukuran evaluasi kinerja	4. Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol di Jawa Timur
		5. Untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik dan transparan	5. Percepatan pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur
		6. Meningkatkan koordinasi inter dan antar institusi dengan mengembangkan teknologi informasi dilingkungan pemerintahan untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik	6. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya
		7. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan prasarana jalan dan jembatan	7. Meningkatkan dan mengembangkan koordinasi di antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan
			8. Meningkatkan dan mengembangkan koordinasi di antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			9. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan
			10 Mendorong peran serta aktif masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan

## 2. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTAKARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR

### VISI :

*“ Terwujudnya Masyarakat Sejahtera melalui Pembangunan Bidang Keciptakarya yang lebih berkembang dan penataan ruang yang berkelanjutan “*

### MISI :

- Meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan perumahan/permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
- Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta lingkungan permukiman melalui penyehatan lingkungan permukiman
- Meningkatkan penataan ruang provinsi beserta pengendaliannya yang berkelanjutan

**Tabel 3.4**

### Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan perumahan/permukiman yang layak huni	Mengurangi backlog perumahan	Menurunnya jumlah backlog perumahan	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak khususnya bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah	Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
			Meningkatnya pembangunan Rusunawa		
		Meningkatkan kualitas Lingkungan perumahan / permukiman yang lebih baik	Meningkatnya jumlah renovasi RTLH	Pembangunan PSU	Peningkatan pembangunan PSU di kawasan permukiman
			Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman pada kawasan permukiman (Pembangunan PSU), dan kawasan khusus		
		Meningkatnya dukungan prasarana dan sarana di kawasan agropolitan	Pembangunan jalan usaha tani	Peningkatan pembangunan jalan usaha tani di kawasan Agropolitan	
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni serta menghadapi	Meningkatnya pelatihan dan sertifikasi bidang jasa konstruksi bagi masyarakat pekerja konstruksi	Pendidikan dan pelatihan kemasyarakatan produktif jasa konstruksi	Pendidikan dan pelatihan kemasyarakatan produktif melalui jasa konstruksi dalam menghadapi AFTA 2015		

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		persaingan bebas (AFTA 2015) di bidang konstruksi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan PNPB perkotaan, PPIP Perdesaan	Pendampingan dan evaluasi PNPB dan PPIP	Pendampingan dan evaluasi PNPB dan PPIP
		Menciptakan lingkungan permukiman yang ramah lingkungan melalui teknologi bidang perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya pengembangan teknologi dan informasi bidang perumahan dan permukiman	Pengembangan teknologi dan informasi serta pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman	Peningkatan penelitian dan pengujian serta penyebaran informasi teknologi dan pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan
			Meningkatnya penelitian dan pengujian bahan dan struktur bangunan perumahan dan permukiman		
		Peningkatan kualitas gedung negara	Meningkatnya kualitas gedung negara	Renovasi gedung negara	Renovasi gedung negara
Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan infrastruktur pada wilayah tertentu	Tersusunnya program kebutuhan infrastruktur terutama bidang keciptakaryaan	Menyelenggarakan studi-studi inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman	Inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman		
2	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta lingkungan permukiman melalui penyehatan lingkungan permukiman	Meningkatkan pelayanan air bersih	Meningkatnya sarana dan prasarana AB di desa-desa rawan air	Pendataan dan Pemetaan desa-desa rawan air	Pendataan dan Pemetaan desa-desa rawan air
			Meningkatnya sarana dan prasarana AB di perkotaan dan perdesaan	Pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah rawan air	Pembangunan sarana penyediaan air minum di daerah rawan air
				Pengembangan sistem penyediaan air minum regional	Melaksanakan fasilitasi SPAM Regional
			Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum	Peningkatan kinerja Penyelenggara SPAM	Penyusunan peraturan pengelolaan AM Memberikan bantuan teknis kepada Penyelenggara SPAM kategori sakit Pembinaan penyelenggaraan SPAM
		Meningkatkan pelayanan Air Limbah	Meningkatnya sarana dan prasarana Air Limbah di perkotaan dan perdesaan	Pengembangan sistem pengolahan air limbah	Pembangunan sarana prasarana pengolahan air limbah
			Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah	Peningkatan kinerja pengelolaan sarana pengolahan air limbah	Penyusunan peraturan pengelolaan air limbah Memberikan bantuan teknis kepada kelompok pengelola sarana air limbah kategori sakit Pembinaan pengelolaan sarana air limbah
		Meningkatkan pelayanan drainase dan persampahan	Mengoptimalkan saluran drainase sebagai pematung air hujan	Pembangunan dan perbaikan saluran drainase	Pembangunan dan perbaikan saluran drainase di daerah rawan banjir
			Meningkatnya kinerja pengelolaan drainase	Peningkatan kinerja pengelolaan drainase	Penyusunan peraturan pengelolaan drainase Pembinaan Pengelolaan Drainase
			Meningkatnya sarana persampahan	Pengembangan sistem pengelolaan sampah	Pembangunan sarana persampahan
				Pengembangan pengelolaan sampah regional	Melaksanakan fasilitasi pengelolaan sampah regional
		Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Peningkatan kinerja pengelola sampah	Penyusunan peraturan pengelolaan sampah Pembinaan Pengelolaan sampah	
		3	Meningkatkan penataan ruang provinsi beserta pengendaliannya	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang wil. Provinsi yg erklanjutan	Terwujudnya perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang penataan ruang

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	yang berkelanjutan			Peningkatan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota	Fasilitasi Upaya Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur
				Perumusan peraturan /kebijakan sebagai dasar Pemanfaatan ruang di Jawa Timur	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang
				Peningkatan ketaatan Rencana Tata Ruang di Provinsi Jawa Timur	Fasilitasi Upaya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

#### **3.4.1 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

Kebijakan penataan ruang Kota di bidang pengelolaan lingkungan meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
2. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, meliputi :

#### **1. Strategi Sanitasi Kota**

#### **2. Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik**

- 1) Meningkatkan pembiayaan sanitasi dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Lembaga Donor.
- 2) Internalisasi program dan kegiatan sanitasi bagi pokja sanitasi dan aparatur pengelola air limbah.
- 3) Membangun sarana air limbah pada wilayah yang padat penduduk.
- 4) Mengoptimalkan kader lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik

#### **3. Strategi Pengembangan Drainase**

1. Melakukan pendataan daerah yang sering terjadi genangan dan penyebab utamanya.
2. Melakukan identifikasi kerusakan saluran drainase dan pemetaan saluran drainase

#### **4. Strategi Pengelolaan Air Bersih dan Air Minum**

1. Meningkatkan pemecuan di Kelurahan yang rawan air.
2. Mengoptimalkan pengolahan, rehabilitasi jaringan perpipaan sehingga warga tidak meragukan kualitas ai bersih dan air minum PDAM

## 5. Strategi terpadu perubahan iklim

Isu perubahan iklim menjadi salah satu tantangan bagi kota dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan; terutama dengan adanya hasil-hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh kegiatan manusia terhadap terjadinya perubahan iklim ini. Maka dari itu, kota perlu menentukan sikap dalam menghadapi isu ini. Tidak hanya sebagai suatu tantangan, isu perubahan iklim ini tentunya juga harus diperlakukan sebagai suatu peluang; baik dari sisi peluang pendanaan maupun dari sisi pergeseran pola pikir masyarakat kearah yang lebih baik.

Adapun tujuan dari Strategi Terpadu Perubahan Iklim Kota Blitar adalah :

*“Mewujudkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menuju penurunan emisi GRK Kota Blitar sebesar 11% pada Tahun 2020”*

### **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW )**

- Evaluasi permasalahan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Blitar saat ini banyak terjadi perubahan penggunaan lahan yang tidak melalui perijinan dimana berdampak pada penataan dan pemanfaatan ruang.
- Ruang Terbuka Hijau yang mulai beralih fungsi menjadi perumahan dan pertokoan.
- Menurunnya luasan sempadan sungai karena adanya permukiman liar dan pertokoan di sekitar bantaran sungai
- Kepastian hukum tentang sangsi pelanggaran tata ruang kota

### **3.4.2 TELAAHAN TERHADAP KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS ( KLHS )**

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) Isu-isu Pembangunan berkelanjutan di Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pengikisan nilai - nilai kebangsaan, nilai - nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal
2. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik
3. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air
4. Belum optimalnya pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
5. Penurunan luasan lahan pertanian

## Telaahan Kajian Lingkungan Hidup

- Menurunnya kuantitas dan kualitas sumber mata air dikarenakan semakin cepatnya pertumbuhan penduduk dan konversi lahan menjadi lahan perkotaan.
- Pencemaran air yang dikarenakan pembuangan sampah, tinja dan limbah rumah tangga mengakibatkan menurunnya kualitas air baik air tanah maupun air sungai.
- Sampah perkotaan pada Tempat Pembuangan Akhir yang tidak diolah secara maksimal menyebabkan kerusakan tanah dan pencemaran udara serta cepat habisnya tempat pembuangan sampah tersebut.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan program pembangunan dalam wilayah Kota Blitar.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan di wilayah kota blitar, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional, kebijakan nasional (RPJMN), regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur), dan lain-lain yang berdampak langsung pada pembangunan Kota Blitar selama lima tahun kedepan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan urusannya terdapat banyak isu-isu strategis antara lain :

- a. Isu kecukupan infrastruktur penunjang usaha dan kecukupan pemanfaatan jaringan teknologi komunikasi informasi di suatu daerah akan meningkatkan peluang daya saingnya. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi antar daerah dan pusat dan wilayah pelosok untuk mendukung sektor industri kreatif dan sektor pariwisata dan kemudahan aksesibilitas terhadap kegiatan skala nasional serta pengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung daerah perkotaan sebagai pusat dan simpul utama kegiatan perdagangan barang sebagai pintu gerbang nasional. Alih fungsi lahan dan pengendalian ruang pada kawasan beridentitas budaya lokal menjadi tantangan tersendiri Pemerintah Kota Blitar*

b. *Isu strategis lingkungan hidup* adalah bagaimana mengatasi degradasi lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan dan mengatasi perubahan iklim di Kota Blitar. Peningkatan kepadatan bangunan akibat penambahan penduduk berimplikasi pada berkurangnya daerah-daerah resapan air dan krisis air tanah. Kondisi sistem drainase yang buruk di perkotaan memperparah terjadinya genangan dan banjir yang dapat membawa korban jiwa dan harta serta berbagai wabah penyakit. Masalah eksploitasi energi, mengakibatkan pemanasan global, perubahan iklim global, dan banjir cenderung meningkat. Dari ranah isu regulasi, perlu penegasan Implementasi Kebijakan tata ruang wilayah dan tata guna lahan, kebijakan kebersihan dan ketertiban, dan kebijakan pro lingkungan hidup yang berkelanjutan. Disamping itu, perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat. Isu strategisnya adalah menggeser paradigma dari penanggulangan bencana menuju pengelolaan mitigasi bencana

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dalam RENSTRA sesuai dengan Sasaran dalam RPJMD Kota Blitar dan Indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar selama Tahun 2016 - 2021. Sedangkan Sasaran RENSTRA merupakan penjabaran atau implementasi dari Tujuan RENSTRA, dan Indikatornya menjadi Indikator Sasaran Strategis selama Tahun 2016 - 2021. Gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :



**Tabel 4.1.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus Perhitungan	Realisasi 2016	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Realisasi 2016
1	Meningkatkan kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Rata-rata penjumlahan persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya	90,07%	1. Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	1. Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana pemanfaatan ruang	Rata-rata penjumlahan persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya	90,07%
2	Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	73,54%	2. Meningkatnya kualitas jalan dan jaringan irigasi yang sesuai standar	1. Persentase jalan yang memenuhi kriteria mantap	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	73,54%
						2. Persentase jembatan dalam kondisi baik	( Jumlah jembatan dalam kondisi baik dibagi jumlah jembatan total ) x 100%	98,62%
						3. Persentase drainase dalam kondisi baik	( Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi panjang total saluran drainase ) x 100%	80,00%
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air	1. Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	( Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih dibagi jumlah rumah tangga ) x 100%	80,94%	3. Sarana dan Prasarana yang memadai guna meningkatkan	Persentase KK yang mendapat layanan air bersih yang layak	( Jumlah KK yang terlayani air limbah yang layak dibagi jumlah rumah tangga ) x 100%	80,94%

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus Perhitungan	Realisasi 2016	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Realisasi 2016
	minum dan sanitasi	2. Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah	( Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air limbah dibagi jumlah rumah tangga ) x 100%	98,22%	kualitas permukiman	2. Persentase rumah tangga dengan layanan air limbah yang aman	( Jumlah rumah tangga yang terlayani IPAL dibagi jumlah rumah tangga ) x 100%	98,22%
		3. Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan	( Jumlah kawasan yang terlayani saluran drainase perkotaan dibagi jumlah kawasan yang harus terlayani saluran drainase ) x 100%	91,93%		3. Persentase kawasan dengan layanan drainase perkotaan	( Jumlah kawasan yang terlayani saluran drainase perkotaan dibagi jumlah kawasan yang harus terlayani saluran drainase ) x 100%	91,93%

**Tabel 4.1.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017
1	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Persentase infrastruktur pekerjaan umum dalam kondisi baik	Rata-rata penjumlahan infrastruktur jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan, jaringan irigasi dalam kondisi baik, gedung pemerintah yang sesuai standar, saluran drainase dalam kondisi baik	79,6	89,12	1 Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	74	74,069
						2 Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	( Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi panjang total jaringan irigasi ) x 100%	92	94,4
						3 Meningkatkan kualitas sarana prasarana keciptakaryaan	1 Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart	( Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah ) x 100%	55	93,17
							2 Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	( Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih dibagi jumlah rumah tangga ) x 100%	87,39	86,53
							3 Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah	( Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air limbah dibagi jumlah rumah tangga ) x 100%	98,1	99,02

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017
							4	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	( Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi panjang total saluran drainase ) x 100%	93
4	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Rata-rata penjumlahan persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya	91,59	93,09					

**Tabel 4.1.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus Perhitungan	Target				Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	TARGET			
				2018	2019	2020	2021				2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Persentase infrastruktur pekerjaan umum dalam kondisi baik	Rata-rata penjumlahan infrastruktur jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan, jaringan irigasi dalam kondisi baik, gedung	79,8	80	80,2	80,4	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	74,5	75	75,5	76

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus Perhitungan	Target				Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	TARGET			
				2018	2019	2020	2021				2018	2019	2020	2021
			pemerintah yang sesuai standar, saluran drainase dalam kondisi baik					2. Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	( Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi panjang total jaringan irigasi ) x 100%	93	94	95	96
								3. Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakaryaan	1 Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart	( Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah ) x 100%	60	65	70	75
								2 Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	( Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih dibagi jumlah rumah tangga ) x 100%	93,69	100	100	100	
								3 Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah	( Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air limbah dibagi jumlah rumah tangga ) x 100%	99,5	100	100	100	
								4 Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	( Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi panjang total saluran drainase ) x 100%	94	95	96	97	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus Perhitungan	Target				Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	TARGET			
				2018	2019	2020	2021				2018	2019	2020	2021
								4. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Rata-rata penjumlahan persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya	92,47	93,4	93,96	94,57

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah. Gambaran mengenai Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut :





**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : “ Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021</b>					
<b>MISI ke-3 : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Indistri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan</b>					
<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>	
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Meningkatkan kualitas terhadap kondisi yang ada serta melengkapi jaringan jalan dan jembatan yang ada dengan pembangunan baru	
				Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala	
		2. Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi secara rutin dan berkala	
		3. Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakaryaan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana keciptakaryaan		Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan gedung pemerintah
					Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih
					Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air limbah
			Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan saluran drainase secara rutin dan berkala		
4. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	Meningkatkan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup secara terpadu	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang			



The page contains a large amount of extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the paper. The text is scattered across the white background and is not readable.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan ( Tahun 2016 – 2021 ) program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar memprioritaskan program unggulan dan program lanjutan guna menyelesaikan kegiatan yang bersifat menerus.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kota Blitar. Dalam upaya mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana Tahun 2016 – 2021 akan direalisasikan secara bertahap dan dengan pendekatan prioritas kegiatan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat dan berbasis pada penataan ruang kota. Untuk mendukung dalam merealisasi program dan kegiatan dibutuhkan dana dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD / DAU, APBD Propinsi Jawa Timur dan APBN. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar merupakan kegiatan sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang kota Blitar lintas SKPD bahkan direncanakan lintas wilayah, sedangkan penjabarannya dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam Matriks Program Lima Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar ( Tabel 6.1 )

**Tabel 6.1.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KOTA BLITAR TAHUN 2016**

Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator					2016		2016			
								Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatkan kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana pemanfaatan ruang	1.03.01.15	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang dalam peta analog dan digital di kota dan kecamatan</b>	%	75	472.590.000	75	468.356.500	Bidang Tata Ruang	Kota Blitar
				1.03.01.15.07	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Jumlah dokumen RTBL yang tersusun	dokumen	3	472.590.000	3	468.356.500		
				1.03.01.15.16	Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang	Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate	sistem	1	-				
				1.03.01.17	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap dokumen rencana tata ruang</b>	%	97,75	108.085.800	97,75	99.097.857		
				1.03.01.17.08	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah lokasi bangunan ber-IMB yang dimonitor	lokasi	144	108.085.800	144	99.097.857		
				1.03.01.16	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Prosentase bangunan ber-IMB</b>	%	74,3	504.793.000	73,00	469.124.000		
				1.03.01.16.05	Survey dan Pemetaan	Jumlah updating data sistem informasi database pemanfaatan ruang dan pembuatan peta	dokumen	7	390.000.000	7	386.681.000		
				1.03.01.16.07	Sosialisasi kebijakan, norma standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Jumlah sosialisasi NSPM	kali	3	114.793.000	2	82.443.000		
Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	Meningkatnya kualitas jalan dan jaringan irigasi yang sesuai standar	Persentase jalan yang memenuhi kriteria mantap	1.03.01.18	<b>Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Prosentase jalan dalam kondisi mantap dan berselamatan</b>	%	73,5	68.173.761.033	73,50	67.243.448.882	Bidang Bina Marga dan SDA	Kota Blitar
				1.03.01.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	m	1580	4.126.156.100	1580	3.811.678.323		
						Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin	m	5000		5000			
						Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin	m	1000		1000			
		1.03.01.18.06	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK )	Panjang jalan yang dilakukan peningkatan	m	4750	30.606.095.100	4750	30.379.005.074				
				Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan	unit	1		1					

Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator					2016		2016			
								Target	Rp.	Target	Rp.		
				1.03.01.18.07	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK Tambahan )	Panjang Jalan yang dilakukan peningkatan	m	37710	28.231.318.500	37.710	27.878.029.500		
				1.03.01.18.12	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop )	Panjang jalan yang dilakukan peningkatan	m	2.570	5.210.191.333	2.570	5.174.735.985		
				1.03.01.19	<b>Program Peningkatan Sarana dana Prasarana Kebinamargaan</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik</b>	%	<b>60</b>	<b>35.000.000</b>	<b>60</b>	<b>35.000.000</b>		
				1.03.01.19.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah paket pemeliharaan alat-alat berat	paket	4	35.000.000	4	35.000.000		
		Persentase drainase dalam kondisi baik		1.03.01.17	<b>Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong</b>	<b>Prosentase turap/talud/bronjong terbangun</b>	%	<b>60</b>	<b>6.877.790.200</b>	<b>60</b>	<b>6.753.898.700</b>		
				1.03.01.17.03	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Panjang talud yang terbangun	m	3122	6.877.790.200	3.122	6.753.898.700		
				1.03.01.20	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>	<b>Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi baik</b>	%	<b>95,1</b>	<b>18.328.371.400</b>	<b>95,1</b>	<b>18.016.882.145</b>		
				1.03.01.20.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin	m	1900	456.331.300	1.900	453.187.000		
				1.03.01.20.18	Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )	Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan	m	16400	14.993.511.200	16.400	14.792.950.045		
				1.03.01.20.23	Rehabilitasi Drainase Perkotaan	Panjang drainase perkotaan yang direhabilitasi	m	1156	2.525.138.900	1.156	2.418.071.900		
				1.03.01.20.24	Pemeliharaan Saluran Drainase	Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan pemeliharaan rutin	m	1750	353.390.000	1.750	352.673.200		
				1.03.01.23	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana kota terbangun</b>	%	<b>50</b>	<b>11.017.629.150</b>	<b>50</b>	<b>10.505.365.881</b>	<b>Bidang Cipta Karya</b>	<b>Kota Blitar</b>
				1.03.01.23.06	Pembangunan sarana / prasarana fasilitas umum	Jumlah fasilitas umum yang terbangun	unit	6	2.481.819.200	6	2.379.814.200		
				1.03.01.23.09	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah	Jumlah gedung pemerintah yang terbangun	unit	4	7.459.333.500	4	7.249.989.479		

Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator					2016		2016			
								Target	Rp.	Target	Rp.		
				1.03.01.23.19	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota	Jumlah dokumen perencanaan / rehabilitasi sarana dan prasarana kota	kegiatan	6	482.442.700	6	385.344.800		
				1.03.01.23.01	Pra Desain Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Kota	Jumlah pra desain sarana prasarana kota yang dihasilkan	dokumen	17	301.451.650	17	288.256.650		
				1.03.01.23.03	Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik	Jumlah DED perencanaan pembangunan infrastruktur yang diverifikasi	DED	100	59.920.500	100	56.986.000		
				1.03.01.23.05	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur	Jumlah pembinaan teknis dan workshop yang dilakukan	kali	4	213.689.500	3	129.760.652		
				1.03.01.23.18	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sarana prasarana kota	Jumlah bangunan fisik yang dimonitoring	paket	25	18.972.100	25	15.214.100		
				1.03.01.24	<b>Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum</b>	<b>Prosentase bangunan pemerintah sesuai standarisasi bidang pekerjaan umum</b>	%	<b>50</b>	<b>351.373.300</b>				
				1.03.01.24.01	Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI)	Jumlah buku standart harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan	buku	5	57.605.200	5	54.432.300		
				1.03.01.24.03	Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi	Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian tenaga teknik	kali	4	157.591.500	3	96.688.689		
						Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan	eksemplar	1000					
						<b>Prosentase ketersediaan data bidang ke-PU an</b>	%	<b>70</b>		<b>70</b>			
				1.03.01.24.04	Pengelolaan Data Elektronik Bidang ke-PU an	Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur	database	3	136.176.600	3	133.278.600		
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan	Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang memadai guna meningkatkan	Prosentase KK yang mendapat layanan air bersih yang layak	1.03.01.21	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	<b>Prosentase masyarakat yang terlayani air bersih</b>	%	<b>30</b>	<b>4.628.084.361</b>	<b>30</b>	<b>4.519.154.640</b>		
				1.03.01.21.06	Pembangunan jaringan air bersih / air minum	Jumlah sambungan rumah yang terbangun	SR	200	2.697.224.361	200	2.662.566.000		

Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator					2016		2016				
								Target	Rp.	Target	Rp.			
sanitasi		kualitas permukiman				Jumlah SPAM yang terbangun	spam	2		4				
						Prosentase masyarakat yang terlayani air limbah	%	98		98				
				Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah	Prosentase rumah tangga dengan layanan air limbah yang aman	1.03.01.21.11	Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat	Jumlah prasarana IPAL yang terbangun	unit	6	1.833.100.000			6
	Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan				1.03.01.21.12	Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sanitasi perkotaan	kali	4	97.760.000	4			94.664.640
					1.03.01.16	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong</b>	<b>Prosentase saluran drainase / gorong-gorong terbangun</b>	%	<b>60</b>	<b>8.229.538.000</b>	<b>60</b>			<b>8.062.369.094</b>
					1.03.01.16.03	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong terbangun	m	4450	8.229.538.000	4.450			8.062.369.094
					1.03.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran</b>	%	<b>100</b>	<b>511.176.150</b>	<b>100</b>			<b>471.660.236</b>
1.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	rekening	4	93.600.000	4	67.717.687							
1.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan yang terbayarkan	unit	20	8.760.000	20	6.394.400							
1.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi	jenis	72	35.000.000	72	35.000.000							
1.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan yang terpenuhi	jenis	9	32.795.750	9	32.795.750							
1.03.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	jenis	20	17.971.500	20	17.971.500							
1.03.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	jenis	38	17.207.000	38	17.207.000							

Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator					2016		2016			
								Target	Rp.	Target	Rp.		
				1.03.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu tahun	jenis	4	7.560.000	4	7.560.000		
				1.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makan minum yang tersedia	paket	12	22.512.000	12	22.155.000		
				1.03.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	DL	50	275.769.900	50	264.858.899		
				1.03.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik</b>	%	<b>80</b>	<b>846.850.000</b>	<b>80</b>	<b>795.882.402</b>		
				1.03.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	jenis	9	47.780.000	9	46.979.180		
				1.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi	unit	23	197.476.000	23	188.573.922		
				1.03.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis meubelair yang terpenuhi	unit	29	58.825.000	29	58.675.000		
				1.03.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	5	348.395.000	4	342.568.300		
						Jumlah paket pemeliharaan taman	paket	1		1			
				1.03.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur	unit	6	161.174.000	5	125.886.000		
				1.03.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	jenis	24	8.881.000	24	8.881.000		
				1.03.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara	jenis	9	11.119.000	9	11.119.000		
				1.03.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah jenis meubelair kantor yang terpelihara	jenis	4	13.200.000	4	13.200.000		
				1.03.01.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>96.142.500</b>	<b>100</b>	<b>92.970.000</b>		



Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator					2016		2016			
								Target	Rp.	Target	Rp.		
				1.03.01.05.11	Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti	event	4	66.142.500	4	62.970.000		
				1.03.01.05.12	Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD	Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD	kali	5	30.000.000	5	30.000.000		
				1.03.01.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun</b>	%	<b>100</b>	<b>22.307.000</b>	<b>100</b>	<b>21.712.500</b>		
				1.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen yang tersusun ( LKjIP 2016, LPPD 2016, SPM 2016, SOP )	dokumen	4	10.290.000	4	10.186.000		
				1.03.01.06.05	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jumlah jenis dokumen yang tersusun (Renja, RKA, PRKA, DPA, DPPA )	dokumen	5	12.017.000	5	11.526.500		
<b>JUMLAH</b>									<b>120.203.491.894</b>		<b>117.554.922.837</b>		

**Tabel 6.1.2**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR TAHUN 2017**

Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator						2017		2017			
									TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.		
Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Persentase infrastruktur bidang pekerjaan umum dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	1.03.01.33	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang</b>	%	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>869.629.600</b>	<b>80,00</b>	<b>831.442.884</b>	Bidang Tata Ruang	Kota Blitar
				1.03.01.33.06	Penyusunan rencana tehnik ruang kawasan	Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun	dokumen	3	2	368.916.000	2	366.345.068		
				1.03.01.33.16	Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang	Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate	sistem	0						
				1.03.01.33.17	Pengembangan Data Teknis Tata Ruang	Jumlah dokumen teknis tata ruang	dokumen	0	5	420.605.500	5	396.630.016		

Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator						2017		2017			
									TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.		
				1.03.01.33.13	Survey dan Pemetaan	Jumlah updating data sistem informasi database pemanfaatan ruang	database	0	1	80.108.100	1	68.467.800		
				1.03.01.35	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Persentase bangunan yang dapat diberikan rekomendasi IMB</b>	%	97,7	97,75	88.990.500	97,75	76.089.367		
				1.03.01.35.08	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah lokasi bangunan ber-IMB yang dimonitor	lokasi	6160	500	88.990.500	500	76.089.367		
				1.03.01.34	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Prosentase bangunan ber-IMB</b>	%	68,75	74,3	103.606.000		83.800.696		
				1.03.01.34.07	Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual pemanfaatan ruang	Jumlah peserta sosialisasi tentang peraturan tata ruang	orang	375	375	103.606.000	375	83.800.696		
				1.03.01.15	<b>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>Prosentase tanah aset bersertifikat</b>	%	na	92	386.888.900	92	262.051.136		
				1.03.01.15.01	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah tanah aset yang bersertifikat	bidang	na	14	325.759.050	2	216.561.565		
				1.03.01.15.06	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jumlah masalah pertanahan yang terselesaikan	bidang	na	3	61.129.850	2	45.489.571		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	1.03.01.18	<b>Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Prosentase jalan dalam kondisi baik</b>	%	96,5	99,85	36.237.919.500	97,04	35.688.771.576	Bidang Bina Marga dan SDA	Kota Blitar
				1.03.01.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	m	1580	5500	7.128.585.500	5.500	7.038.271.050		
						Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin	m	5000	1500		1500			
						Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin	m	1000	1000		1000			
				1.03.01.18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah Jembatan yang dilakukan pemeliharaan	unit	0	5	1.061.174.400	5	852.521.750		
						Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan	unit	0	1		1			
		1.03.01.18.06	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK )	Panjang jalan yang dilakukan peningkatan	m	42460	5000	17.991.671.900	5000	17.748.345.334				

Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator						2017		2017			
									TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.		
				1.03.01.18.07	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop)	Panjang sarana dan prasarana jalan yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	m	2570	2500	10.056.487.700	2500	10.049.633.442		
				1.03.01.19	<b>Program Peningkatan Sarana dana Prasarana Kebinamargaan</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik</b>	%	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>35.680.000</b>	<b>65</b>	<b>35.680.000</b>		
				1.03.01.19.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	unit	4	4	35.680.000	4	35.680.000		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	1.03.01.17	<b>Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong</b>	<b>Prosentase turap/talud/bronjong terbangun</b>	%	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>3.428.671.200</b>	<b>65</b>	<b>3.421.761.200</b>		
				1.03.01.17.03	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Panjang talud yang terbangun	m	3122	5150	3.428.671.200	5.150	3.421.761.200		
				1.03.01.17	<b>Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud/Bronjong</b>	<b>Prosentase talud dalam kondisi baik</b>	%	<b>60</b>	<b>60</b>					
				1.03.01.17	Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud/Bronjong	Panjang Talud yang direhabilitasi	m	-						
				1.03.01.20	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>	<b>Persentase luas layanan jaringan pengairan</b>	%	-	<b>76,4</b>	<b>14.488.311.100</b>	<b>76,4</b>	<b>14.412.982.852</b>		
				1.03.01.20.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin	m	1900	1500	687.290.900	1.500	684.785.500		
				1.03.01.20.18	Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )	Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan	m	16400	3697	4.242.800.600	3.697	4.185.151.356		
				1.03.01.20.23	Rehabilitasi Drainase Perkotaan	Panjang drainase perkotaan yang direhabilitasi	m	1156	11500	9.558.219.600	11.500	9.543.045.996		
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakaryaan	Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart	1.03.01.23	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana kota terbangun</b>	%	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>21.326.460.400</b>	<b>55</b>	<b>19.882.577.900</b>	Bidang Cipta Karya	Kota Blitar
				1.03.01.23.06	Pembangunan sarana / prasarana fasilitas umum	Jumlah fasilitas umum yang terbangun	unit	6	8	7.363.293.800	6	6.087.243.100		
				1.03.01.23.07	Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana Kota	Jumlah bangunan gapuro yang terbangun	unit		2	430.478.800	2	424.070.800		

Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator						2017		2017			
									TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.		
				1.03.01.23.09	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah	Jumlah gedung pemerintah yang terbangun	unit	4	7	12.681.839.000	7	12.554.750.300		
				1.03.01.23.10	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah	Jumlah sarana prasarana gedung pemerintah yang direhabilitasi	unit		3	694.251.000	3	690.170.000		
				1.03.01.23.04	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur	Jumlah pesereta pembinaan teknis dan workshop yang dilakukan	orang	300	300	156.597.800	300	126.343.700		
				1.03.01.24	<b>Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan teknis bidang pekerjaan umum yang sesuai standar</b>	%	-	<b>33,33</b>	<b>603.122.600</b>	<b>33,33</b>	<b>499.892.250</b>		
				1.03.01.24.01	Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI)	Jumlah buku standart harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan	buku	5	5	75.930.000	5	64.423.500		
				1.03.01.24.03	Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultasi	Coffeemorning stakeholder jasa konstruksi Kota Blitar	kali		3	164.596.600	3	119.531.550		
						Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan	eksemplar	1000	1500		1.000			
				1.03.01.24.05	Pra Desain Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Kota	Jumlah Buku Panduan Standart Perawatan dan Pemeliharaan BGN	buku		5	141.894.400	5	116.628.200		
				1.03.01.24.06	Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik	Jumlah DED perencanaan pembangunan infrastruktur yang diverifikasi	DED	100	100	62.600.000	100	55.933.200		
						<b>Persentase ketersediaan data bidang ke-PU an</b>	%	<b>66,67</b>	<b>80</b>		<b>80</b>			
				1.03.01.24.04	Pengelolaan Data Elektronik	Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur	database	3	3	158.101.600	3	143.375.800		
			2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	1.03.01.21	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	<b>Persentase jaringan air minum yang terbangun</b>	%	-	<b>66,67</b>	<b>6.295.986.400</b>	<b>66,67</b>	<b>5.838.521.423</b>		
				1.03.01.21.13	Pembangunan jaringan air bersih / air minum	Jumlah sambungan rumah yang terbangun	SR	200	3	3.912.134.600	3	3.655.110.400		
						Jumlah SPAM yang terbangun	spam	4	5		5			

Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator						2017		2017			
									TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.		
						Prosentase jaringan air limbah yang terbangun	%	-	87,14		87,14			
		3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah		1.03.01.21.11	Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat	Jumlah prasarana IPAL yang terbangun	unit	6	5	2.239.763.500	11	2.075.183.500		
				1.03.01.21.12	Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sanitasi perkotaan	kali	4	20	144.088.300	24	108.227.523		
		4. Prosentase saluran drainase dalam kondisi baik		1.03.01.16	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong</b>	<b>Prosentase saluran drainase / gorong-gorong terbangun</b>	%	60	65	404.000.000	65	400.853.300		
				1.03.01.16.05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase yang dilakukan pemeliharaan rutin	m	0	1300	404.000.000	1.300	400.853.300		
				1.03.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran</b>	%	100	100	410.666.700	100	391.417.250	Sekretariat	Kota Blitar
				1.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	rekening	4	5	93.960.000	5	80.510.021		
				1.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan yang terbayarkan	unit	20	20	8.760.000	20	8.667.100		
				1.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi	jenis	72	72	34.943.500	72	34.943.500		
				1.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan yang terpenuhi	jenis	9	9	22.992.400	9	22.992.400		
				1.03.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	jenis	20	20	9.879.200	20	9.879.200		
				1.03.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	jenis	38	38	11.296.900	38	11.296.900		

Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator						2017		2017			
									TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.		
				1.03.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu tahun	jenis	4	4	7.740.000	4	7.500.000		
				1.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makan minum yang tersedia	paket	12	12	19.129.600	12	18.585.000		
				1.03.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	DL	50	34	201.965.100	34	197.043.129		
				1.03.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik</b>	%	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>579.929.000</b>	<b>80</b>	<b>569.897.559</b>		
				1.03.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	jenis	9	9	82.888.800	9	82.888.800		
				1.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi	unit	23	10	151.618.900	10	145.077.959		
				1.03.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	4	2	189.190.000	2	186.406.500		
						Jumlah paket pemeliharaan taman	paket	1	1		1			
				1.03.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur	unit	5	6	120.936.600	6	120.229.600		
				1.03.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	jenis	24	24	8.833.000	24	8.833.000		
				1.03.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara	jenis	9	9	15.561.700	9	15.561.700		
				1.03.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah jenis meubelair kantor yang terpelihara	jenis	4	4	10.900.000	4	10.900.000		
				1.03.01.07	<b>Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100</b>	<b>59.951.000</b>		

Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator						2017		2017				
									TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.			
				1.03.01.07.11	Fasilitasi keberansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti	event	4	5	50.000.000	5	49.951.000			
				1.03.01.07.12	Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD	Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD	kali	5	2	10.000.000	2	10.000.000			
				1.03.01.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun</b>	%	100	100	20.000.000	100	19.967.200			
				1.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen yang tersusun ( LKJIP 2016, LPPD 2016, SPM 2016, SOP )	dokumen	4	4	10.000.000	4	9.967.200			
				1.03.01.06.05	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jumlah jenis dokumen yang tersusun (Renja, RKA, PRKA, DPA, DPPA )	dokumen	5	5	10.000.000	5	10.000.000			
<b>JUMLAH</b>											<b>85.339.861.900</b>		<b>82.475.657.593</b>		

**Tabel 6.1.3**

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR TAHUN 2018**

Tujuan		Sasaran		KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					2018		
								Target	Rp.	
Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Persentase infrastruktur bidang pekerjaan umum dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	1.03.1.03.01.05	<b>Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Persentase jalan dalam kondisi baik</b>	%	99,9	46.184.181.150,00	Bidang Bina Marga dan SDA
				1.03.1.03.01.05.01	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan	m	7000	6.933.989.050,00	

Tujuan		Sasaran		KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					2018		
								Target	Rp.	
						Jumlah jembatan yang dibangun dan ditingkatkan	unit			
						Panjang utilitas jalan yang dibangun dan ditingkatkan	m			
				1.03.1.03.01.05.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin	m	1000	2.898.878.300,00	
						Panjang utilitas jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin	m	1000		
						Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan rutin	unit	3		
				1.03.1.03.01.05.03	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK )	Panjang jalan yang dilakukan peningkatan kapasitasnya	m	5000	36.304.331.800,00	
						Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan	unit			
				1.03.1.03.01.05.04	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( Banprop )	Panjang jalan yang dilakukan peningkatan	m			
						Panjang utilitas jalan yang dilakukan rehabilitasi	m			
						Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan	unit			
				1.03.1.03.01.05.05	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	unit	4	46.982.000,00	
				1.03.1.03.01.06	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>	<b>Persentase luas layanan jaringan pengairan</b>	<b>%</b>	<b>85</b>	<b>15.027.541.900,00</b>	
					<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi</b>	<b>Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik</b>				



Tujuan		Sasaran		KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					2018		
								Target	Rp.	
				1.03.1.03.01.06.01	Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Panjang jaringan pengairan/irigasi yang dibangun	m	5000	5.493.450.000,00	
				1.03.1.03.01.06.02	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun	m	5000	2.862.487.800,00	
				1.03.1.03.01.06.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya	Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin	m	2000	637.412.800,00	
				1.03.1.03.01.06.04	Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )	Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan	m	3000	3.354.432.600,00	
				1.03.1.03.01.06.05	Rehabilitasi / Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	Panjang turap/talud/bronjong yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan	m	750	2.679.758.700,00	
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakaryaan	1. Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart	1.03.1.03.01.08	Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum	Persentase dokumen perencanaan teknis bidang pekerjaan umum yang sesuai standart	%	50	732.166.000,00	Bidang Cipta Karya
						Persentase ketersediaan data bidang ke-PU an	%	90		
				1.03.1.03.01.08.01	Pengelolaan Data Elektronik Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur	database	3	164.080.000,00	
				1.03.1.03.01.08.02	Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI)	Jumlah buku standart harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan	buku	4	69.005.000,00	

Tujuan		Sasaran		KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					2018		
								Target	Rp.	
				1.03.1.03.01.08.04	Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultasi	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Jakon dan Keahlian Teknik	orang	100	176.391.100,00	
						Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan	eksemplar	1500		
				1.03.1.03.01.08.03	Pra Desain Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Kota	Jumlah pra desain sarana prasarana kota yang dihasilkan	pradesain	5	109.726.700,00	
						Jumlah Sosialisasi Buku Panduan Standart ke-PU an	kali	2		
				1.03.1.03.01.08.05	Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik	Jumlah DED perencanaan pembangunan infrastruktur yang diverifikasi	DED	100	50.811.000,00	
				1.03.1.03.01.08.06	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur	Jumlah peserta pembinaan teknis dan pelatihan yang dilakukan	orang	120	162.152.200,00	
				1.03.1.03.01.07	<b>Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keciptakarya</b>	<b>Persentase gedung pemerintah yang dibangun dan dipelihara</b>	%	<b>33,33</b>	<b>8.840.699.565,00</b>	
				1.03.1.03.01.07.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen aturan penyelenggaraan bangunan gedung	dokumen	1	115.605.400,00	
				1.03.1.03.01.07.05	Pembangunan dan Rehabilitasi sarana / prasarana fasilitas umum	Jumlah fasilitas umum yang dibangun dan direhabilitasi	unit	2	1.682.261.500,00	

Tujuan		Sasaran		KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					2018		
								Target	Rp.	
				1.03.1.03.01.07.06	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah	Jumlah gedung pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi	unit	1	1.161.092.000,00	
			<b>2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih</b>			<b>Persentase jaringan air minum yang terbangun</b>	%	<b>83,33</b>		
				1.03.1.03.01.07.03	Pembangunan jaringan air bersih / air minum	Jumlah sambungan rumah yang terbangun	SR	1	642.052.665,00	
						Jumlah SPAM yang terbangun	spam	1		
			<b>3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah</b>			<b>Persentase jaringan air limbah yang terbangun</b>	%	<b>94,28</b>		
				1.03.1.03.01.07.04	Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat	Jumlah prasarana IPAL yang terbangun	unit	6	4.768.344.000,00	
				1.03.1.03.01.07.01	Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah peserta sosialisasi sanitasi perkotaan	orang	400	68.014.000,00	
			<b>4. Prosentase saluran drainase dalam kondisi baik</b>			<b>Persentase saluran drainase yang dipelihara</b>	%	<b>36,03</b>		
				1.03.1.03.01.07.07	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase	Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun dan dilakukan pemeliharaan rutin	m	1000	403.330.000,00	
		<b>Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang</b>	<b>Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang</b>	<b>1.03.1.03.01.09</b>	<b>Program Penataan Ruang</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang</b>	%	<b>85</b>	<b>1.026.510.300,00</b>	<b>Bidang Tata Ruang</b>
				<b>1.03.1.03.01.09.01</b>	Survey dan Pemetaan	Jumlah dokumen survey dan pemetaan yang tersusun	dokumen	1	52.765.400,00	
				<b>1.03.1.03.01.09.02</b>	Pengembangan Data Teknis Tata Ruang	Jumlah dokumen teknis tata ruang	dokumen	1	158.841.000,00	

Tujuan		Sasaran		KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					2018		
								Target	Rp.	
				1.03.1.03.01.09.03	Penyusunan Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	dokumen	2	485.959.200,00	
				1.03.1.03.01.09.04	Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang	Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate	sistem	1	252.666.100,00	
				1.03.1.03.01.09.05	Sosialisasi kebijakan, norma standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Jumlah peserta sosialisasi NSPM	orang	375	59.296.000,00	
				1.03.1.03.01.09.06	Monitoring evaluasi dan pelaporan penataan ruang	Jumlah dokumen hasil survey perizinan tata ruang	dokumen	2	16.982.600,00	
				2.04.1.03.01.05	<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>Persentase tanah aset bersertifikat</b>	%	<b>97</b>	<b>323.928.400,00</b>	
				2.04.1.03.01.05.01	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Tanah Asset Pemerintah Kota yang telah bersertifikat	aset	543	267.155.500,00	
				2.04.1.03.01.05.02	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jumlah penyelesaian masalah pertanahan	bidang	35	56.772.900,00	
				1.03.1.03.01.01	<b>Program Pelayanan Perkantoran</b>	<b>Persentase kecukupan pelayanan perkantoran</b>	%	<b>100</b>	<b>1.362.064.680,00</b>	<b>Sekretariat</b>
				1.03.1.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	rekening	5	99.996.000,00	
				1.03.1.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	unit	21	9.570.000,00	
				1.03.1.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	jenis	72	114.156.200,00	

Tujuan		Sasaran		KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					2018		
								Target	Rp.	
				1.03.1.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	jenis	9	22.946.550,00	
						Jumlah lembar pengandaan	lembar	8573		
				1.03.1.03.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	jenis	20	10.543.900,00	
				1.03.1.03.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	jenis	38	16.346.430,00	
				1.03.1.03.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	jenis	4	7.740.000,00	
				1.03.1.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makan minum yang tersedia	paket	12	19.458.000,00	
				1.03.1.03.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	rakor	88	416.775.000,00	
				1.03.1.03.01.01.20	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	macam	5	80.358.600,00	
				1.03.1.03.01.01.21	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi	macam	17	170.401.800,00	
				1.03.1.03.01.01.22	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis meubelair yang terpenuhi	macam	4	58.269.500,00	
				1.03.1.03.01.01.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	126.334.200,00	

Tujuan		Sasaran		KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					2018		
								Target	Rp.	
				1.03.1.03.01.01.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur	unit	5	176.429.200,00	
				1.03.1.03.01.01.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	macam	2	7.569.400,00	
				1.03.1.03.01.01.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara	macam	9	14.261.000,00	
				1.03.1.03.01.01.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah jenis meubelair kantor yang terpelihara	macam	4	10.908.900,00	
				1.03.1.03.01.02	<b>Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar</b>	%	<b>100</b>	<b>60.119.300,00</b>	
				1.03.1.03.01.02.04	Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti	event	4	50.027.500,00	
				1.03.1.03.01.02.05	Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD	Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	publika si	1	10.091.800,00	
				1.03.1.03.01.03	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan</b>	%	<b>100</b>	<b>1.722.400,00</b>	
						<b>Nilai SKM</b>		<b>baik</b>		

Tujuan		Sasaran		KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					2018		
								Target	Rp.	
				1.03.1.03.01.03.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen yang tersusun ( SPIP, SPM, SOP, LKj IP , LPPD , IKM )	dokumen	6	1.256.000,00	
				1.03.1.03.01.03.03	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jumlah jenis dokumen yang tersusun Renstra, Renja, RKA, IKU/IKI, PRKA, DPA, DPPA )	dokumen	7	466.400,00	
<b>JUMLAH</b>									<b>73.558.933.695,00</b>	

**Tabel 6.1.4**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR TAHUN 2019-2021**

Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat.	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Persentase infrastruktur bidang pekerjaan umum dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	1.03.1.03.01.05	<b>Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Persentase jalan dalam kondisi baik</b>	%	<b>97,04</b>	<b>100</b>	<b>19.321.985.000,00</b>	<b>100</b>	<b>34.913.444.813,00</b>	<b>100</b>	<b>35.973.767.824,00</b>	<b>100</b>	Bidang Bina Marga dan SDA	Kota Blitar
				1.03.1.03.01.05.01	Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan, dan Utilitasnya	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan	m	7.080	900	7000	7000	21980					
					Jumlah jembatan yang dibangun dan ditingkatkan	unit	1	1	1	1	4						

Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat.	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangak at Daerah Penangg unjawab	Lokasi
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Panjang utilitas jalan jembatan yang dibangun dan ditingkatkan	m		930		1000		1000		2930		
				1.03.1.03.01.05.01	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan ( DAK )	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan	m	47460	5000		5000		5000		62460		
						Jumlah jembatan yang dibangun dan ditingkatkan		0							0		
				1.03.1.03.01.05.04	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan (Banprop)	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan									0		
						Panjang utilitas jalan jembatan yang dibangun dan ditingkatkan	m	5070	110		5000		5000		15180		
						Jumlah jembatan yang dibangun dan ditingkatkan									0		
				1.03.1.03.01.05.02	Rehabilitasi / Pemeliharaan / Operasional Jalan, Jembatan dan Utilitasnya	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin	m	6500	1200		1000		1000		9700		
						Panjang utilitas jalan jembatan yang dilakukan pemeliharaan rutin	m	2000	1000		1000		1000		5000		
						Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan rutin	unit	5			3		3		11		
						Jumlah alat berat yang dipelihara	unit	8	4		4		4		20		



Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat.	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	1.03.1.03.01.06	<b>Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>	<b>Persentase luas layanan jaringan pengairan</b>	%	76,4	90	5.240.986.000,00	95	16.751.711.122,00	100	17.464.668.519,00	100		
				1.03.1.03.01.06.01	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi dan Bangunan Air Lainnya	Panjang jaringan pengairan/irigasi yang dibangun dan ditingkatkan	m	8.272	600	1.750.000.000,00	10000	10.901.711.122,00	10000	11.614.668.519,00	28872		
				1.03.1.03.01.06.03	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi dan Bangunan Air Lainnya ( DAK )	Panjang jaringan irigasi yang dibangun dan ditingkatkan	m	20.097	3000	2.640.986.000,00	3000	4.500.000.000,00	3000	4.500.000.000,00	29097		
				1.03.1.03.01.06.02	Rehabilitasi / Pemeliharaan / Operasional Jaringan Irigasi dan Bangunan Air Lainnya	Panjang jaringan pengairan/irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin	m	3.400	2000	850.000.000,00	2750	1.350.000.000,00	2750	1.350.000.000,00	10900		

Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat.	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangk at Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakaryaan	1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	1.03.1.03.01.07	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keciptakaryaan	Persentase jaringan air minum yang terbangun	%	66,67	100	7.926.435.624,00	100	24.017.560.479,00	100	25.049.718.171,00	Bidang Cipta Karya	Kota Blitar	
						Persentase jaringan air limbah yang terbangun	%	87,14	100		100						
						Persentase saluran drainase yang dipelihara	%		40,39		44,75		49,1				
						Persentase gedung pemerintah yang dibangun dan dipelihara	%		66,67		83,33		1000				
				1.03.1.03.01.07.03	Pembangunan bangunan/jaringan air bersih/air minum (DAK)	Jumlah sambungan rumah yang dibangun	SR	3		200	3.500.000.000,00	200	403				
						Jumlah SPAM yang dibangun	unit	9	1	2		2	14				
			2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah	1.03.1.03.01.07.04	Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( DAK )	Jumlah prasarana IPAL yang dibangun	unit	11	5	1.478.239.000,00	7	2.300.000.000,00	7	2.300.000.000,00			30
						1.03.1.03.01.07.01	Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan/Jaringan Air Minum/Air Bersih, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Jumlah peserta sosialisasi sanitasi dan air minum perkotaan	orang		400	2.890.000.000,00	500	500			1400
								Jumlah sambungan rumah yang dibangun dan dipelihara	SR		20		500	500			1020
				Jumlah SPAM yang dibangun dan dipelihara	unit					1	1		2				

Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat.	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg unjawa b	Lokasi
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			3. Persentase saluran drainase dalam kondisi baik			Jumlah prasarana IPAL yang dibangun	unit		4		1		1		6		
			4. Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart	1.03.1.03.01.07.02	Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan	Panjang saluran drainase yg terbangun & terpelihara	m	1.300	2000		1000		1000		5300		
						Jumlah dokumen & fasilitasi aturan penyelenggaraan bangunan gedung	dokum en		1		1		1		3		
						Jumlah data dan analisa kondisi bangunan gedung pemerintah	data			3.158.196.624,00	1		1		2		
						Jumlah Fasilitas Umum yang dibangun dan direhabilitasi	unit	12	1		4		4		21		
						Jumlah gedung pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi	unit	14	1		1		1		17		
				1.03.1.03.01.08	Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum	Persentase ketersediaan data bidang ke-PU-an	%	80	80		90		100		100		
						Persentase ketersediaan dokumen perencanaan teknis bidang pekerjaan umum	%		66,67	410.000.000,00	83,33		100	940.000.000,00	100		
				1.03.1.03.01.08.01	Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi	Jumlah data sarana prasarana kota yang di inventarisasi dan diupdate	databa se	6	2		2		2		12		
						Jumlah Buku standart Harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan	buku	10	4	410.000.000,00	4		4		22		
						Jumlah DED Infrastruktur yang diverifikasi dan Pra	DED	200	100		100		100	940.000.000,00	500		



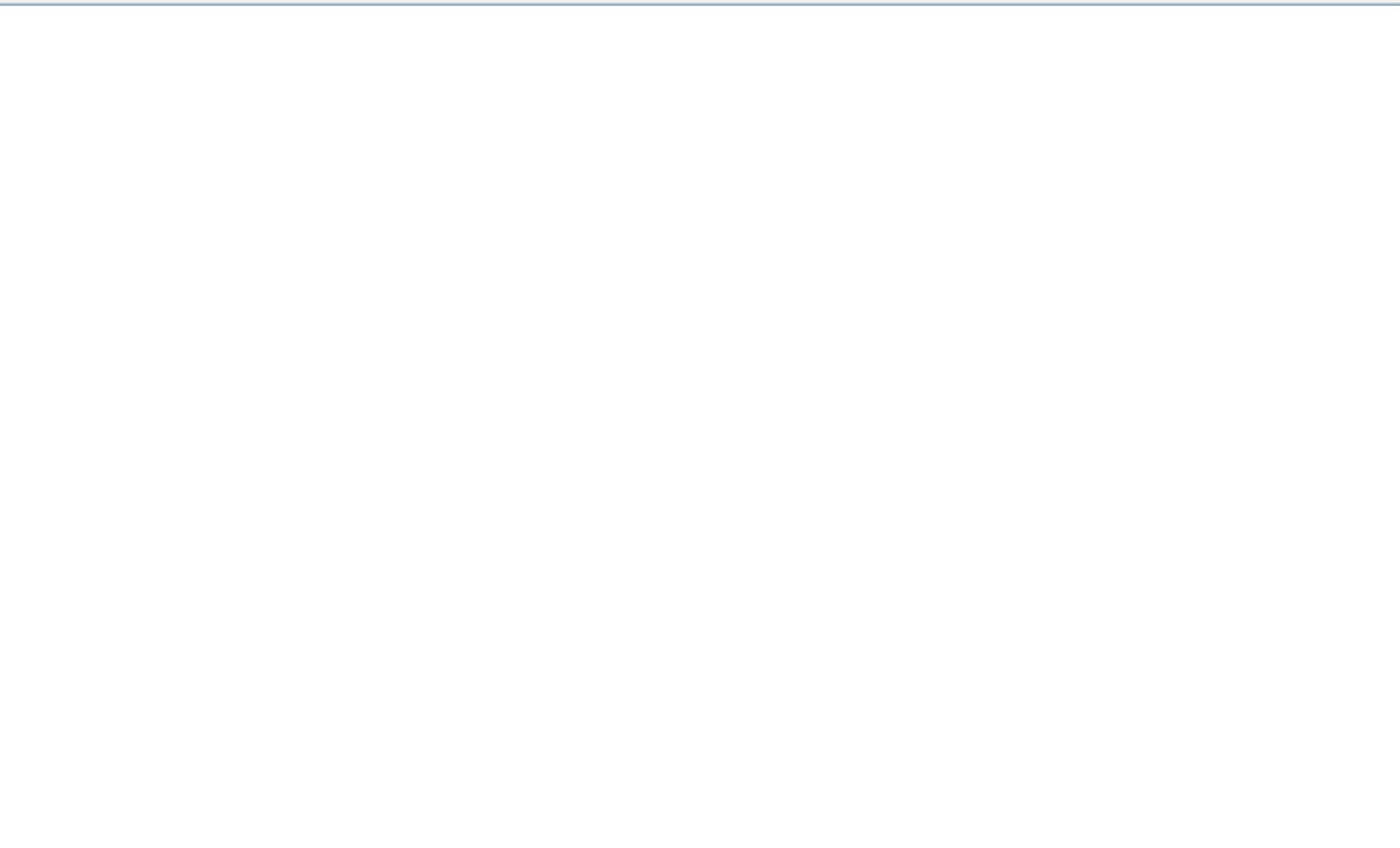
Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat.	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg unjawa b	Lokasi
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
				2.04.1.03.01.05	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Tanah Aset Bersertipikat	%		98	250.000.000,00	99	338.406.739,87	100	352.809.423,08	100		
				2.04.1.03.01.05.01	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah fasilitasi jasa aprasial tanah	dokum en		1	250.000.000,00	1	338.406.739,87	1	352.809.423,08	3		
						Jumlah Data Pertanahan yang terupdate	data		1		1		2				
						Jumlah sertifikat tanah aset Pemkot yang diterbitkan	sertifik at		10		1		12				
						Jumlah masalah pertanahan yang terselesaikan	masala h		1		1		3				
				1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Perkantoran	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	%	100	100	1.509.960.000,00	100	1.440.000.000,00	100	1.515.000.000,00	100		
				1.03.1.03.01.01.01	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	maca m	144	96	199.960.000,00	72	100.000.000,00	72	125.000.000,00	384		
						Jumlah barang cetakan yang tersedia	maca m	18	9		10		47				
						Jumlah lembar penggandaan	lembar		4172		8000		20172				
						Jumlah bahan bacaan yang tersedia	maca m	8	4		4		20				

Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat.	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg unjawa b	Lokasi
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	dos	1.000	400		500		500		2400		
				1.03.1.03.01.01.02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	rakor	84	150	600.000.000,00	80	625.000.000,00	80	650.000.000,00	394		
				1.03.1.03.01.01.04	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan Dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan	rekening	9	5	675.000.000,00	5	700.000.000,00	5	725.000.000,00	24		
						Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	unit	40	21		21		21		103		
						Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	macam	40	16		20		20		96		
						Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	macam	76	30		38		38		182		
						Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	macam	18	4		5		5		32		
						Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	macam	33	15		10		10		68		
						Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	macam	48	4		2		2		56		
						Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	macam	18	10		9		9		46		
						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	unit	11	6		5		5		27		

Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat.	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
						Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	unit	6	2		1		1		10			
				1.03.1.03.01.01.05	Penyusunan Dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	dokumen	8	5	30.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	23			
				1.03.1.03.01.01.06	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	dokumen		3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	9			
					<b>Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>61.638.158,00</b>	<b>100</b>	<b>64.261.495,00</b>	<b>100</b>			
				1.03.1.03.01.02.01	Pengelolaan Administrasi Dan Kelengkapan Kepegawaian	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	even	9	4	50.000.000,00	4	51.638.158,00	4	54.261.495,00	21			

Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat.	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangak at Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
				1.03.1.03.01.02.02	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	publikasi	7	1	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	12		
					<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.546.053,00</b>	<b>100</b>	<b>5.420.498,00</b>	<b>100</b>		
				1.03.1.03.01.03.01	Penyusunan Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	dokumen	10	10	5.000.000,00	10	5.546.053,00	10	5.420.498,00	40		
<b>JUMLAH</b>										<b>35.253.387.224,00</b>		<b>79.601.311.320,87</b>		<b>82.596.913.737,08</b>			





Secara garis besar rencana program yang akan di laksanakan pada Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penataan Ruang
5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
6. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
7. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya.
8. Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum.
9. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keciptakarya

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Keterkaitan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah pada :

Misi ketiga : **Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.**

Tujuan keempat : **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan penataan ruang.**

Sasaran ke – 15 : **Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan**

Indikator Sasaran dalam RPJMD tersebut kemudian menjadi Indikator Tujuan dalam RENSTRA sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut :

**Tabel 7.1.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar**  
**yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2017**

INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET 2017	REALISASI 2017
		2015	2016		
Persentase infrastruktur bidang pekerjaan umum dalam kondisi baik	Persentase infrastruktur bidang pekerjaan umum dalam kondisi baik	78,22	79,43	79,60	89,12

**Tabel 7.1.2**  
**Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar**  
**yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2018-2021**

INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Th. 2021
			2018	2019	2020	2021	
Persentase infrastruktur bidang pekerjaan umum dalam kondisi baik	Persentase infrastruktur bidang pekerjaan umum dalam kondisi baik	89,12	79,80	80,00	80,20	80,40	80,4

**Tabel 7.1.3**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2017 -2021**

No.	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	74	74,5	75	75,5	76	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	( Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi panjang total jaringan irigasi ) x 100%	92	93	94	95	96	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air
3	Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakaryaan	Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar ( Standar : Permen PU Nomer 45/PRT/M/2007 )	( Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah ) x 100%	55	60	65	70	75	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	( Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih dibagi jumlah rumah tangga ) x 100%	87,39	93,69	100	100	100	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah	( Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air limbah dibagi jumlah rumah tangga ) x 100%	99	99,5	100	100	100	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi
		Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	( Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi panjang total saluran drainase ) x 100%	93	94	95	96	97	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi
4	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Rata-rata penjumlahan persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya	91,59	92,47	93,36	93,96	94,57	Bidang Tata Ruang

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2016 – 2021 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2016 – 2021 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar dan disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja maka akan dilakukan perubahan Renstra dengan berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Blitar, 17 Juli 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Blitar



**Drs. HERMANSYAH PERMADI, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660423 199203 1 007



